



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Utilisasi Upaya oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam  
Membantu Penyelesaian Konflik di Sri Lanka**

Skripsi

Oleh

Melinda Lastris Susetyo

2016330229

Bandung

2020



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Utilisasi Upaya oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam  
Membantu Penyelesaian Konflik di Sri Lanka**

Skripsi

Oleh

Melinda Lastris Susetyo

2016330229

Pembimbing:

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Melinda Lastri Susetyo  
Nomor Pokok : 2016330229  
Judul : Utilisasi Upaya oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam  
Membantu Penyelesaian Konflik di Sri Lanka

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 7 Januari 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A. :

**Sekretaris**

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si :

**Anggota**

Dr. Aknoit Kristian Pakpahan :

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama: Melinda Lastri Susetyo

NPM: 2016330229

Program Studi: Ilmu Hubungan Internasional

Judul: Utilisasi Upaya oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam Membantu  
Penyelesaian Konflik di Sri Lanka

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 8 Januari 2020



Melinda Lastri Susetyo

## **Abstrak**

Nama : Melinda Lastri Susetyo

NPM : 2016330229

Judul : Utilisasi Upaya oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam Membantu Penyelesaian Konflik di Sri Lanka

---

Penelitian ini beranjak dari Pertanyaan Penelitian, yakni, Bagaimana Upaya Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam Membantu Penyelesaian Konflik di Sri Lanka? Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan penggunaan upaya oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam Membantu Penyelesaian Konflik di Sri Lanka. Dengan bermodal kapasitasnya sebelumnya yang pernah menjadi mediator di konflik Israel-Palestina dan momentum dimana konflik sudah mencapai titik jenuh, Norwegia menjadi pihak ketiga yang dipercaya sebagai fasilitator resmi oleh Pemerintah Sri Lanka dan Macan Tamil. Dalam analisis konflik dan menjawab pertanyaan penelitian, ini akan menggunakan Teori Konflik Johan Galtung, Teori Soft Power Joseph S. Nye jr., Konsep Peacebuilding Boutros Boutros-Ghali, Konsep Kapasitas Karl DeRoun dan Kesempatan Ira William Zartman, dan Konsep Mediasi oleh Sara Horowitz. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menekankan bagaimana Pemerintah Kerajaan Norwegia menggunakan Kapasitas dan Kesempatan sebagai instrumen soft power nya dalam pembuatan draft klausul perdamaian konflik di Sri Lanka. Penelitian ini menemukan adanya penggunaan soft power dalam konflik Sri Lanka oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam bentuk kapasitasnya sebagai fasilitator resmi konflik dan kesempatan yang dimanfaatkan. Hal ini ditandai dengan adanya penunjukkan resmi dari dua pihak dan pemanfaatan momentum di titik jenuh konflik. Dengan adanya dua hal yang menjadi bagian dari soft power dan upaya untuk memulihkan perdamaian oleh Norwegia, dapat disimpulkan utilisasi ini menjadi penting dalam perkembangan pemulihan perdamaian di Sri Lanka, meskipun upaya ini disebut gagal mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kapasitas dan Kesempatan, Norwegia, Sri Lanka, Soft Power,

Perdamaian

## Abstract

Name : Melinda Lastri Susetyo

NPM : 2016330229

Title : *Utilization of Efforts by the Royal Norwegian Government in Facilitating Resolution of Sri Lankan Conflict*

---

*This research starts from a research question, which questioned on How the Royal Norwegian Government (RNG) Utilized its Efforts in Facilitating Resolution of Sri Lankan Conflict. The purpose of this research is to describe the Usage of efforts by the RNG in Sri Lankan Conflict Resolution Facilitation. Based on what the RNG has as their modalities in facing the conflict, such as previous experience in mediating Israel-Palestine conflict, and exact moment where the conflict reaches its peak, the RNG is entrusted to facilitate the conflict by the Government of Sri Lanka and Tamil Tigers. In analyzing the conflict and answering the research question, it will be answered according to Conflict Theory of Johan Galtung, Soft Power Theory from Joseph Nye, Peacebuilding concept by Boutros Boutros-Ghali, Capacity concept by Karl DeRoun, Chance concept by Ira William Zartman, and Mediation concept by Sara Horowitz. The methodology for this research is using the Qualitative Research, which emphasized on How the RNG Utilized the Capacity and Chance as Part of Their Soft Power Instrument in Drafting Peace Clausal for Sri Lankan Conflict. This research found that there is usage of efforts made by the RNG as shown in their capacity as appointed facilitator of conflict and chance utilization. It marked by official appointed facilitator role and utilization of chance when the conflict reaches its peak. Along with two modalities as part of their soft power and the efforts to restore peace in Sri Lanka, it can be concluded that these utilizations are important in developing peace in Sri Lanka after the conflict, even though in the end it failed in achieving a lasting peace as planned before.*

*Keywords: Capacity and Chance, Norway, Sri Lanka, Soft Power, Peace*

## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan penelitian yang bertajuk Utilisasi Upaya oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam Membantu Penyelesaian Konflik di Sri Lanka.

Penelitian ini akan membahas mengenai Upaya Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam Membantu Penyelesaian Konflik di Sri Lanka. Untuk memahami studi kasus tersebut, Penulis menggunakan konsep dan teori yang akan dijabarkan lebih lanjut pada Bab I Pendahuluan. Penulis melihat adanya upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga, dalam kasus ini Pemerintah Kerajaan Norwegia, untuk mengakhiri konflik antara Pemerintah Sri Lanka dan Macan Tamil. Disamping rasa keingintahuan penulis mengenai isu ini, Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan jenjang Strata-1, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis juga memahami bahwa tulisan ini masih belum sempurna tanpa adanya masukan dari pembaca, sehingga masukan dari pembaca menjadi sesuatu yang berharga bagi penulis untuk meningkatkan kualitas penelitian ini.

Bandung, 11 Desember 2019

Melinda Lastri S

## DAFTAR ISI

Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian.....	4
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	4
1.2.2 Pembatasan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Kajian Literatur.....	7
1.5 Kerangka Pemikiran.....	13
1.6 Metoda Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	17
1.6.1 Metoda Penelitian .....	17
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data .....	18
1.7 Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II Konflik antara Pemerintah Sri Lanka dengan Macan Tamil .....	21
2.1 Perbedaan Klaim antara Dua Pihak yang Berkonflik .....	21
2.2 Peningkatan Intensitas Kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Sri Lanka dan Macan Tamil.....	26
2.3 Eskalasi Konflik antara Pemerintah Sri Lanka dengan Macan Tamil .....	30
2.4 Kemampuan Pemerintah Sri Lanka dalam Menghadapi Konflik.....	33
2.5 Titik Jenuh Konflik.....	34
2.6 Keterlibatan Pihak Ketiga dalam Konflik.....	36
2.6.1 Pemerintah India .....	36
2.6.2 Pemerintah Kerajaan Norwegia .....	38
BAB III Utilisasi Kapasitas dan Kesempatan yang digunakan Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam Upaya Pembuatan Draft Klausul Perdamaian Konflik di Sri Lanka .....	41
3.1 Utilisasi Kapasitas <i>Peacebuilding</i> Pemerintah Kerajaan Norwegia di Konflik Sri Lanka ....	42
3.2 Utilisasi Kesempatan dalam <i>Peacebuilding</i> oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia di Konflik Sri Lanka .....	47
3.2.1 Awal Mula Perubahan.....	47



3.2.2 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Sri Lanka dan Macan Tamil dalam Penyelesaian Konflik .....	52
3.2.3 Kesiapan Pemerintah Sri Lanka dan Macan Tamil dalam Menyelesaikan Konflik .....	55
BAB IV Kesimpulan .....	63
Daftar Pustaka .....	65

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam pembuatan draft klausul perdamaian di konflik Sri Lanka, Pemerintah Kerajaan Norwegia menjadi pihak ketiga yang menjadi penghubung antara dua pihak yang berkonflik, Pemerintah Sri Lanka dan Macan Tamil. Dengan menjadi pihak yang menghubungkan, Pemerintah Kerajaan Norwegia bisa mengakhiri konflik antara masyarakat etnis Sinhala dengan masyarakat etnis Tamil yang sudah berlangsung selama lebih dari dua dekade ini. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus adalah bagaimana Pemerintah Kerajaan Norwegia menggunakan Kapasitas dan Kesempatan yang ada untuk membuat draft klausul perdamaian di konflik Sri Lanka.

Konflik antara Pemerintah Sri Lanka dengan Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE—sering disebut sebagai Macan Tamil) sudah berlangsung hingga 26 tahun lamanya, dan estimasi orang yang menjadi korban antara 80,000 hingga 100,000<sup>1</sup>. Awal mula dari konflik yang berlangsung hingga Februari 2002, yang ditandai dengan adanya Perjanjian Gencatan Senjata (CFA) antara Pemerintah Sri Lanka dan Macan Tamil, adalah konflik antar etnis Sinhala dan etnis Tamil yang diawali dengan terbitnya kebijakan yang pro-Sinhala dan mendiskriminasi Etnis Tamil yakni, *Sinhalese-only Act*<sup>2</sup>. Menurut perspektif pemerintah Sri Lanka, Macan Tamil merupakan sebuah kelompok bersenjata

---

<sup>1</sup> Rawat, Anshuman. "Civil war in Sri Lanka." *IAAS. The Newsletter* 59 (2012).

<sup>2</sup> World Bank. "The Root Causes of the Ethnic Conflict in Sri Lanka". not dated. Hal. 2

yang berbahaya, menurut Pemerintah Sri Lanka, yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi Tamil Eelam<sup>3</sup>. Sementara menurut Macan Tamil, Pemerintah Sri Lanka sudah memperlakukan etnis Tamil secara diskriminatif dan tindakan ini adalah wujud dari *self-determination*-nya, sehingga hal tersebut bagi mereka dapat menjustifikasi tindakan pemberontakan yang terjadi<sup>4</sup>.

Konflik yang terjadi di internal Sri Lanka ini menyebabkan, setidaknya ada 3 Perang Eelam terjadi selama konflik ini berlangsung hingga 2001, sebelum adanya perjanjian gencatan senjata antara kedua pihak pada 2002<sup>56</sup>. Sebelum adanya perjanjian gencatan senjata oleh kedua pihak, usaha untuk mencapai perdamaian sudah dilakukan, namun hasilnya nihil dan menemui jalan buntu dan para sarjana melihat kemungkinan konflik ini mencapai resolusi nihil. Usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik ini terus dilakukan, hingga melibatkan pihak ketiga untuk menjadi fasilitator perdamaian.

Masyarakat internasional, termasuk Pemerintah Kerajaan Norwegia, tidak tinggal diam, melihat dan membiarkan konflik ini terus berkejolak. Dengan melihat situasi dari perang ini, Norwegia, salah satu negara yang

---

<sup>3</sup> The Permanent Mission of Sri Lanka to the United Nations Office at Geneva. "The Terrorist' War against Sri Lanka." (2007).

<sup>4</sup> Patrick Peebles "Civil War" in, *The History of Sri Lanka* (Westport (Conn.): Greenwood Press, 2006). Hal. 155

<sup>5</sup> Kristian Stokke, "Building the Tamil Eelam State: Emerging State Institutions and Forms of Governance in LTTE-controlled Areas in Sri Lanka," *Third World Quarterly* 27, no. 6 (2006), doi:10.1080/01436590600850434. Hal. 1022

<sup>6</sup> Nisha Arunatilake, Sisira Jayasuriya, and Saman Kelegama, "The Economic Cost of the War in Sri Lanka," *World Development* 29, no. 9 (2001), doi:10.1016/s0305-750x (01)00056-0. Hal. 1484

mengutamakan perdamaian dan rekonsiliasi, menjadi pihak yang ditunjuk oleh kedua pihak untuk menjadi fasilitator resmi.

Norwegia merupakan negara yang memiliki reputasi di mata dunia internasional, terutama mengenai rekonsiliasi dan perdamaian. Norwegia membangun reputasinya sebagai fasilitator antara pihak yang berkonflik dan pendukung dari PBB sejak 1990, dan menilai konflik yang terjadi di dunia bisa menyebabkan ketidakstabilan keamanan dunia<sup>7</sup>. Dilansir dari situs pemerintahan Norwegia, Regjeringen.no, Norwegia membantu pihak-pihak yang terlibat konflik mencapai resolusi dan rekonsiliasi dengan mengetahui penyebab dari konflik tersebut dan melibatkan pihak domestik, regional, dan internasional untuk membawa solusi yang dapat membawa situasi politik yang stabil. Dengan mengetahui penyebab dari konflik, Norwegia menawarkan solusi tepat-guna yang mampu mengurangi dampak dari perang sekaligus menegakan hukum internasional. Hal ini menunjukkan respons Norwegia merupakan negara yang peduli terhadap keamanan dunia dan demokrasi yang berkembang secara damai dan berkelanjutan. Selain itu, usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia menghasilkan citra positif sebagai fasilitator perdamaian dan rekonsiliasi yang handal sehingga negara-negara yang sedang berkonflik bisa meminta bantuan kepadanya.

Peran Pemerintah Kerajaan Norwegia sebagai pihak ketiga netral dan menengahi konflik antara Pemerintah Sri Lanka dengan Macan Tamil

---

<sup>7</sup> Regjeringen.no, "Norway's Peace and Reconciliation Policy," Regjeringen.no, November 23, 2016, , accessed January 30, 2019, <https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/peace-and-reconciliation-efforts/innsiktsmappe/facilitation/id708238/>.

menghasilkan serangkaian perundingan perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik dengan total perundingan enam sesi yang diselenggarakan di berbagai negara<sup>8</sup>. Sebelum adanya pertemuan ini, Pemerintah Sri Lanka dan Macan Tamil membuat sebuah perjanjian gencatan senjata dan berkomitmen untuk menyelesaikan konflik yang berkelanjutan ini secara damai.

## 1.2 Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam proses negosiasi untuk mencapai resolusi dan rekonsiliasi konflik, negosiasi dilakukan secara tertutup, namun, dalam konflik Sri Lanka merupakan hal sebaliknya, dimana Pemerintah Kerajaan Norwegia, Pemerintah Sri Lanka, dan Macan Tamil melakukan negosiasi secara terbuka dengan prinsip transparansi<sup>9</sup>. Ini merupakan bukan hal biasa terjadi dalam proses negosiasi untuk mencapai resolusi. Hal ini dilakukan dengan ada maksudnya, Pemerintah Kerajaan Norwegia ingin upayanya sebagai fasilitator tidak hanya sebatas sebagai negara yang menyediakan kebutuhan, namun sebagai negara yang mendorong tercapainya perdamaian dunia<sup>10</sup>.

Dalam setiap proses penyelesaian konflik, tentu akan menghadapi hambatan, tidak terkecuali usaha Norwegia dalam memfasilitasi pemerintah Sri Lanka dengan Macan Tamil untuk mencapai perdamaian, meskipun Norwegia sendiri memiliki reputasi dan kredibilitas dalam memperjuangkan perdamaian

---

<sup>8</sup> Sri Lanka Monitoring Mission. "Mission Concept," in *The SLMM Report 2002-2008 The Operation - The Organisation. Sri Lanka Monitoring Mission* (2010). Hal. 44

<sup>9</sup> James Larry Taulbee, Ann Kelleher, and Peter C. Grosvenor, "Norway's Approach to Achieving Peace: Structure and Agency," in *Norway's Peace Policy: Soft Power in a Turbulent World* (New York: Palgrave Macmillan, 2014). Hal. 65

<sup>10</sup> Ibid.

dunia. Dalam upaya Norwegia memfasilitasi pihak yang berkonflik, timbul celah baru yang menjadi bahan evaluasi bagi Norwegia untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh celah tersebut.

Sebuah lembaga riset asal Norwegia di bidang resolusi konflik, NORAD, mengatakan bahwa, konflik Pemerintah Sri Lanka dengan Macan Tamil merupakan sebuah konflik yang sulit untuk diatasi<sup>11</sup>. Perjanjian Gencatan Senjata yang dihasilkan oleh Macan Tamil dan Pemerintah Sri Lanka yang difasilitasi oleh Norwegia, belum sepenuhnya cukup dan masih ada yang harus diperbaiki, seperti, transparansi terhadap kerangka strategis yang dimanfaatkan oleh kedua pihak yang berkonflik untuk kepentingan mereka sendiri<sup>12</sup>. Pemerintah Kerajaan Norwegia sendiri terus menekankan pentingnya tercapainya kesepakatan agar konflik ini tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan korban yang lebih banyak, namun hal ini dihambat dengan adanya kepentingan yang berbeda, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan<sup>13</sup>. Kesulitan dalam menyatukan kepentingan yang berbeda menjadi tantangan terbesar Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam Mediasi Perdamaian ini.

---

<sup>11</sup> Gunnar M. Sørbo, Johnathan Goodhand, and Bart Klem, "Executive Summary," in *Pawns of Peace: Evaluation of Norwegian Peace Efforts in Sri Lanka, 1997-2009* (Oslo: NORAD, Norwegian Agency for Development Cooperation, 2011). Hal. xv

<sup>12</sup> Tyrol Ferdinands, Kumar Rupesinghe, Paikiasothy Saravanamuttu, Jayadeva Uyangoda, Norbert Ropers, "Executive Summary and Recommendation," *The Sri Lankan Peace Process at Crossroads: Lessons, Opportunities, and Ideas for Principled Negotiations and Conflict Transformation*. (Colombo, 2004). Hal. i

<sup>13</sup> Secretariat for Coordinating the Peace Process, "2002 to 2008: Ceasefire Agreement," Ceasefire Agreement, 2002 to 2008, , accessed May 09, 2019, <http://peaceinsrilanka.lk/negotiations/ceasefire-agreement-20028>.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Dikarenakan masalah yang dikaji terlalu luas, dilakukan pembatasan masalah, agar bidang yang dikaji akan lebih spesifik dan lebih mendalam. Pembatasan Masalah dilakukan dengan membatasi lingkup aktor, dalam konteks ini, pembatasan akan mencakup kapasitas sebagai fasilitator resmi dan kesempatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam penyelesaian konflik di Sri Lanka. Selain pembatasan aktor yang terlibat, lini waktu juga dibatasi, dimana penelitian ini akan lebih difokuskan kepada sebelum adanya Perjanjian Gencatan Senjata sampai titik Perang Eelam IV pecah.

### **1.2.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Masalah, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah **“Bagaimana Upaya Pemerintah Kerajaan Norwegia Membantu Penyelesaian Konflik di Sri Lanka?”**

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini yakni, menggambarkan penggunaan kapasitas dan kesempatan oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam pembuatan draft klausul perdamaian konflik di Sri Lanka. Dengan menggunakan konsep Kapasitas Negara dari UN Peacekeeping dan konsep Kematangan Momen dari William Zartman, penelitian ini akan menganalisis bagaimana Pemerintah Kerajaan Norwegia berbekal kapasitas

yang dimiliki sebagai fasilitator perdamaian dan momen yang tepat membantu mengakhiri konflik antara Pemerintah Sri Lanka dengan Macan Tamil, serta terciptanya perdamaian di Sri Lanka.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Selaras dengan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian sebagaimana merupakan manifestasi dari apa yang ingin dicapai dari penelitian ini yang terdiri dari Kegunaan secara Teoritis dan Praktis. Kegunaan secara Teoritis mencakup pemberian sumbangan ilmiah berupa hasil analisis penulis terhadap studi kasus yang dipilih bagi para pembaca, dan sebagai pegangan dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai Kapasitas dan Kesempatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia, terutama dalam Pembuatan Draft Klausul Perdamaian Konflik. Secara Praktis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca mengenai Kapasitas dan Kesempatan yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam Pembentukan Draft Klausul Perdamaian Konflik untuk Konflik di Sri Lanka.

### **1.4 Kajian Literatur**

Terdapat banyak literatur mengenai kapasitas dan kesempatan Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam pembuatan draft klausul perdamaian konflik di Sri Lanka, ada yang bilang upaya yang dilakukan oleh Norwegia merupakan upaya yang berhasil, ada juga yang bilang upaya ini merupakan sesuatu yang malah membuang energi dan sumber daya Norwegia, sehingga perlu dikaji ulang.



John Stephen Moolakkattu dalam jurnalnya bertajuk *'Peace Facilitation by Small States: Norway in Sri Lanka'* menjelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Norwegia cenderung dilakukan secara gamblang dan lebih melibatkan pejabat pemerintah<sup>14</sup>. Meskipun begitu, apa yang dilakukan oleh Norwegia merupakan suatu langkah yang patut yang diapresiasi, mengingat konflik yang dihadapi merupakan konflik yang sulit untuk diselesaikan dan kedua pihak sulit untuk berdamai. Peran Pemerintah Kerajaan Norwegia sebagai negara kecil yang menjadi fasilitator suatu konflik, kemungkinan untuk tercapainya perdamaian itu besar dikarenakan reputasinya sebagai fasilitator yang handal menjadi bahan pertimbangan.

Dalam jurnal ini juga, Moolakkattu menjelaskan bahwa ada sebuah pola yang dibuat oleh Norwegia dalam memfasilitasi konflik, yaitu dengan tidak hanya menggunakan pendekatan yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam dialog tersebut, namun, juga melibatkan pihak-pihak yang diluar pemerintah, seperti dari pihak akademisi dan organisasi non-pemerintah, yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dari level akar-rumput, sehingga informasi yang masuk ke Pemerintah Kerajaan Norwegia sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan baik Pemerintah Kerajaan Norwegia maupun pihak-pihak yang bekerja sama dengannya, bisa menghasilkan tindakan yang tepat-guna.

Vidar Helgesen, dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Moolakkattu, menjelaskan implikasi dari peran Norwegia sebagai fasilitator konflik ini

---

<sup>14</sup> John Stephen Moolakkattu, "Peace Facilitation by Small States: Norway in Sri Lanka," *Cooperation and Conflict* 40, no. 4 (2005): , doi:10.1177/0010836705058225.

adalah keterlibatan jangka panjang pihak-pihak diluar pemerintah, fasilitator tanpa harus menjadi bagian penting dari proses negosiasi, bantuan kemanusiaan yang masuk mampu untuk mencapai rekonsiliasi sekaligus membangun kembali kepercayaan diri korban, mendapat dukungan dari pihak-pihak netral, dan kerahasiaan dan diskresi. Meskipun dengan adanya peran sebagai fasilitator yang disetujui oleh kedua pihak yang berkonflik, masih ada pihak yang menolak penunjukkan Norwegia sebagai fasilitator, dikarenakan adanya kemungkinan Norwegia memiliki agenda yang terselubung, ada juga yang bilang perdamaian yang dibangun tidak mendasar dan tidak menyeluruh, ada juga yang menganggap Norwegia terlalu lemah dihadapan Macan Tamil.

Meskipun memicu pro dan kontra terkait penunjukkan Norwegia sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi proses perdamaian antara pemerintah Sri Lanka dengan Macan Tamil, bagi Pemerintah Kerajaan Norwegia, memfasilitasi perdamaian di dunia internasional merupakan manifestasi kebijakan luar negerinya yang bersumber pada politik dalam negerinya.

Berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh NORAD, sebuah lembaga penelitian di bidang kerja sama pembangunan bertempat di Norwegia, menyatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam menangani kasus Sri Lanka ini merupakan konflik yang sulit untuk diselesaikan mengingat sulitnya untuk menjaga perdamaian sudah dicapai oleh kedua pihak dan difasilitasi oleh Norwegia<sup>15</sup>. NORAD juga

---

<sup>15</sup> Gunnar M. Sørbø, Johnathan Goodhand, and Bart Klem, *Op. Cit.*, hal. xv

memberikan hasil evaluasi yang dilakukan kepada Pemerintah Kerajaan Norwegia sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator perdamaian, Norwegia memiliki pendekatan yang mengedepankan rasa kepemilikan, penggunaan *soft power* sebagai instrumen utama dalam berdialog dan memfasilitasi perdamaian, mengedepankan kerahasiaan, fleksibilitas dan informalitas, dan dukungan dari organisasi non-pemerintah. NORAD juga menjelaskan karakteristik dari upaya-upaya Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam mencapai resolusi konflik adalah dengan tindakan kolaboratif antara Pemerintah Kerajaan Norwegia, terutama Kementerian Luar Negeri, dengan aktor-aktor non-pemerintah. Tindakan ini juga disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan untuk mencapai resolusi konflik, sehingga perdamaian yang dicapai akan lebih menyeluruh dan lebih kuat. Tindakan Norwegia yang berperan aktif untuk mencapai perdamaian dunia dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu, nilai, dimana Norwegia percaya akan adanya tanggung jawab moral terhadap pembangunan dan perdamaian di negara-negara yang membutuhkan bantuan; kepentingan, dimana keamanan Norwegia bergantung kepada stabilitas dunia dan perjuangan melawan kemiskinan di dunia. Meskipun mengalami kritikan dari berbagai pihak, kebijakan luar negeri Norwegia tetap sama, terutama mengenai perannya sebagai fasilitator perdamaian dunia. Kritikan ini membuat kebijakan luar negeri Norwegia harus dievaluasi secara berkala.

Evaluasi yang diberikan oleh NORAD meliputi, hal-hal yang meliputi pendekatan dan tindakan yang seharusnya digunakan dan dilakukan, baik untuk Pemerintah Kerajaan Norwegia sebagai fasilitator perdamaian maupun untuk pemerintah Sri Lanka dan Macan Tamil sebagai pihak-pihak yang berkonflik. NORAD menyarankan untuk Pemerintah Kerajaan Norwegia untuk menyeimbangkan antara *soft power* dan *hard power* nya mengingat Pemerintah Kerajaan Norwegia sendiri mengedepankan penggunaan *soft power* nya daripada *hard power* nya; berhati-hati dalam berstrategi dan memperhitungkan konsekuensi yang akan terjadi; menerapkan syarat-syarat jika kembali diminta untuk menjadi bagian dari proses perdamaian; tidak menggunakan bantuan, baik bantuan ekonomi maupun politik, sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik; berfokus pada peran yang diminta. Dengan adanya hasil dari evaluasi NORAD ini, diharapkan Pemerintah Kerajaan Norwegia dapat mengevaluasi dan formulasi kembali kebijakan luar negerinya.

James Larry Taulbee, Ann Kelleher, dan Peter C. Grosvenor dalam buku yang bertajuk '*Norway's peace policy: Soft Power in Turbulent World*', menyatakan bahwa Pemerintah Kerajaan Norwegia mengambil peran sebagai fasilitator konflik Sri Lanka karena Pemerintah Kerajaan Norwegia peduli terhadap perdamaian dunia dan memiliki tanggung jawab moral sebagai negara yang mengutamakan perdamaian terhadap negara-negara yang sedang bergejolak dan terus berjuang melawan kemiskinan, meskipun sebagian orang menganggap alasan yang dikemukakan oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia sangat klise dan tindakan yang dilakukan hanya membuang tenaga dan sumber

daya<sup>16</sup>. Cara Norwegia dalam mencapai resolusi konflik melalui tidak hanya melalui proses negosiasi antara Pemerintah Kerajaan Norwegia, Pemerintah Sri Lanka, dan Macan Tamil, namun juga melalui bantuan kemanusiaan untuk masyarakat korban konflik, sehingga dengan cara dua arah ini potensi perdamaian akan tercapai dan terjaga lebih besar, dan stabilitas politik akan lebih terjaga.

Taulbee et. al. menjelaskan bahwa ada lima faktor yang menentukan kebijakan luar negeri Norwegia, terutama mengenai rekonsiliasi dan resolusi konflik, yaitu, persetujuan domestik untuk menjalankan komitmennya dalam menerapkan kebijakan luar negerinya, dalam konteks ini, adalah, rekonsiliasi dan resolusi konflik; multi-lateralisme, reputasi dalam kebijaksanaan dan keadilan, pengetahuan yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan yang disediakan oleh organisasi non-pemerintah, dan proses perdamaian yang berjalan beriringan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kerajaan Norwegia tidak hanya bertindak sebagai fasilitator pasif, namun sebagai pihak yang aktif yang mendukung proses perdamaian. Meskipun dengan adanya faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, kritikan terhadap upaya-upaya Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam mencapai resolusi konflik di Sri Lanka.

Berdasarkan pemaparan singkat mengenai kajian literatur ini, dapat disimpulkan bahwa, mediasi perdamaian yang digunakan oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam kasus Konflik Sri Lanka, masih diperlukan evaluasi

---

<sup>16</sup> James Larry Taulbee, Ann Kelleher, and Peter C. Grosvenor, *Op. Cit.*, hal. 66

lebih lanjut agar tujuan dari mediasi ini lebih akurat dan bantuan kemanusiaan yang berikan juga lebih tepat guna. Niat Norwegia memang baik, namun bagi sebagian orang niat baik itu diartikan sebagai ada sesuatu dibaliknyanya. Wajar saja apabila sebagian orang ini berpikiran seperti itu karena tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di pikiran dan niatnya.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab Pertanyaan Penelitian secara konseptual dan teoritis, diperlukan Kerangka Pemikiran yang akan menjadi pegangan dalam penelitian. Kerangka Pemikiran yang digunakan adalah Konsep Konflik, Konsep *Peacebuilding*, Konsep Kapasitas dan Kesempatan dalam *Peacebuilding*, Konsep Mediasi Perdamaian, dan Teori *Soft Power*. Konsep Konflik digunakan untuk menggambarkan konflik di Sri Lanka secara konseptual. Konsep *Peacebuilding* untuk menganalisis tindakan yang mendasari Pemerintah Kerajaan Norwegia untuk memfasilitasi konflik di Sri Lanka. Konsep Kapasitas dan Kesempatan untuk menjelaskan kapabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia dan pada peristiwa apa yang memungkinkan Pemerintah Kerajaan Norwegia melakukan inisiatif perdamaian di konflik Sri Lanka. Konsep Mediasi Perdamaian digunakan untuk menggambarkan secara konseptual pemanfaatan kapasitas dan kesempatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam pembuatan draft klausul perdamaian konflik di Sri Lanka. Teori *Soft Power* oleh Joseph Nye untuk menganalisis kapasitas dan kesempatan Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam pembuatan

draft klausul perdamaian konflik di Sri Lanka sebagai bentuk dari soft powernya.

Terdapat banyak definisi mengenai konflik itu sendiri, ada yang mendefinisikan konflik sebagai sesuatu yang bersifat destruktif dan menimbulkan korban jiwa, ada juga yang mendefinisikan konflik sebagai sesuatu yang hanya berada dalam benak pikiran<sup>17</sup>. Galtung mendefinisikan konflik sebagai kombinasi dari asumsi dan sikap, tingkah laku, dan kontradiksi. Asumsi dan sikap menunjukkan asumsi yang dimiliki dan dimanifestasikan melalui sikap, ditambah dengan tingkah laku pihak yang tidak sesuai, dan terciptanya kontradiksi sebagai bentuk rasa frustrasi, akan membentuk sebuah konflik. Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan sebuah intervensi agar konflik ini tidak meluas dan segera diselesaikan. Intervensi konflik bisa berbagai pendekatannya, salah satunya adalah mediasi, yang menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini.

Konsep *Peacebuilding* merupakan konsep yang mengedepankan penyelesaian konflik dari akar permasalahannya sehingga, perdamaian yang tercipta lebih kuat dan berkelanjutan dan mencegah konflik tersebut terulang kembali<sup>18</sup>. Konsep ini pernah dikemukakan oleh Boutros Boutros-Ghali, mantan Sekretaris-Jenderal PBB, dalam sebuah laporan berdasarkan pertemuan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada 31 Januari 1992.

---

<sup>17</sup> Johan Galtung, "Part II: Conflict Theory," in *Peace by Peaceful Means*, SAGE Publication (1996), hal. 71

<sup>18</sup> Boutros Boutros-Ghali. "II. Definition," in *An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking, and Peacekeeping*, Hal. not identified

Konsep Kapasitas dan Kesempatan dalam *peacebuilding* menunjukkan bahwa pihak yang akan melakukan inisiatif memiliki kapabilitas yang mumpuni sekaligus melakukan inisiatif setelah adanya peristiwa tertentu yang terjadi pada saat terjadinya konflik. Konsep Kapasitas menjadi krusial dimana kapasitas suatu negara menentukan seberapa lama perdamaian itu bertahan<sup>19</sup>. Kapasitas yang dimiliki oleh negara ketika menghadapi konflik menandakan bahwa negara tersebut tidak memiliki kapasitas yang mumpuni sehingga dibutuhkan inisiatif yang dilakukan oleh pihak ketiga. Kapasitas yang dimiliki pihak ketiga ini mampu membantu negara yang kapasitasnya tidak sesuai, diharapkan melalui inisiatif ini negara yang dibantu ini memiliki kapabilitas yang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai negara<sup>20</sup>.

Kesempatan yang dimaksud dalam membangun perdamaian di daerah konflik adalah suatu peristiwa yang menjadi awal mula dari sebuah perubahan. Kesempatan menjadi sama krusialnya dengan kapasitas karena apabila tidak ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang akan melakukan inisiatif, kapasitas yang dimiliki bisa saja menjadi tidak berguna. William Zartman mendefinisikan momen yang matang ketika kedua pihak hanya akan menyelesaikan konflik apabila mereka merasa sudah siap dan melihat adanya

---

<sup>19</sup> UN Peacebuilding. "Section I: The Scope of Peacebuilding," in *UN Peacebuilding: An Orientation*. Peacebuilding Support Office (2010). Hal. 5

<sup>20</sup> Karl DeRouen Jr, Mark J Ferguson, Samuel Norton, Young Hwan Park, Jenna Lea & Ashley Streat-Bartlett., "Civil War Peace Agreement Implementation and State Capacity," *Journal of Peace Research* 47, no. 3 (2010): pp. 333-346, <https://doi.org/10.1177/0022343310362169>. Hal. 35



usulan yang dianggap bisa mengakomodir kepentingan mereka<sup>2122</sup>. Inti dari konsep ini adalah *Mutually Hurting Stalemate*, yang menekankan pentingnya kedua pihak yang berkonflik berada di posisi yang seimbang dan posisi ini membuat mereka tidak bisa mendeklarasikan kemenangan, sehingga mereka lebih memilih untuk mencari solusi sebagai bentuk dari *sense of way out*<sup>23</sup>. Ketika kedua pihak yang berkonflik ini mencari jalan keluar dari konflik, mereka mencari solusi yang bisa mengakomodir kepentingan masing-masing.

Dalam mendefinisikan Mediasi Perdamaian, diperlukan pendefinisian mengenai mediasi dan perdamaian itu sendiri. Mediasi sendiri merupakan sebuah metode yang digunakan oleh pihak ketiga, yang bersifat netral dan menengahi pihak-pihak yang berkonflik, menekankan pada kedua pihak yang berkonflik berdiskusi hingga tercapainya kesepakatan<sup>24</sup>. Kata kunci pada mediasi adalah pihak ketiga yang netral yang mendorong tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik.

Teori *soft power* merupakan teori yang dikemukakan oleh Joseph Nye, Jr. pada salah satu bukunya yang bertajuk '*Soft Power: The Means to Success in World Politics*'. Dalam buku ini, Nye jr. menjelaskan bahwa *soft power* adalah *power* yang mampu mempengaruhi satu entitas untuk melakukan apa yang entitas lainnya inginkan tanpa adanya paksaan dan tanpa ancaman yang bersifat

---

<sup>21</sup> Ira Wiliam Zartman, "The timing of peace initiatives: Hurting stalemates and ripe moments," *The Global Review of Ethnopolitics* 1, no.1 (2008): pp. 8-18. Hal. 8

<sup>22</sup> Sarah Holt. "The 2002-2006 Sri Lankan Peace Process," in *Aid, Peacebuilding and the Resurgence of War: Buying Time in Sri Lanka (Rethinking Peace and Conflict Studies)*. Palgrave Macmillan (2011). Hal.78

<sup>23</sup> Ira Wiliam Zartman, *Op. Cit.*, Hal. 8

<sup>24</sup> Sara Horowitz, "Mediation," in *Handbook of Peace and Conflict Studies* (New York: Routledge, 2007). Hal. 51

*tangible*<sup>2526</sup>. Nye jr. juga menjelaskan bahwa *power* tidak harus selalu menggunakan sesuatu yang bersifat koersif, yang bersifat menarik, seperti bantuan ekonomi dan *peacemaking*, juga bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan<sup>27</sup>.

## 1.6 Metoda Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

### 1.6.1 Metoda Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, Metode yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Dalam Penelitian Kualitatif sendiri memiliki beragam definisi seiring dengan berkembangnya zaman, namun, inti dari Penelitian Kualitatif sendiri adalah menggunakan kerangka teori sebagai basis untuk menganalisis makna secara komprehensif dan sistematis<sup>282930</sup>. Penelitian Kualitatif sendiri tidak sebatas penelitian yang dilakukan untuk mencari makna suatu fenomena secara mendalam.

Dalam Metoda Penelitian, khususnya, Penelitian Kualitatif, yang mengedepankan pencarian makna dari fenomena, ada dua jenis yang menekankan menggambarkan penelitian yakni, deskriptif analitis dan deskriptif eksploratif. Deskriptif analitis lebih

---

<sup>25</sup> Joseph S. Nye, jr. "Changing Nature of Power" in *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. Public Affairs: New York. (2004). hal. 2

<sup>26</sup> Joseph S. Nye, jr. *Ibid.* hal. 5

<sup>27</sup> Joseph S. Nye, jr. *Ibid.* hal. 9

<sup>28</sup> John W. Creswell and J. David. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative & Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks, CA: SAGE, 2014).

<sup>29</sup> John W. Creswell and Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches* (Los Angeles: SAGE, 2018).

<sup>30</sup> Sharan B. Merriam and Elizabeth J. Tisdell, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (Jossey Bass, 2009). Hal. 17

menekankan pada penggambaran fenomena secara mendalam, sementara deskriptif eksploratif lebih menekankan pada penggambaran fenomena secara makro<sup>31</sup>. Dalam penelitian ini, akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif eksploratif.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, Penulis menggunakan Teknik Pengumpulan Data berupa Kajian Dokumen. Sharan B. Merriam (2009) menjelaskan kajian Dokumen sendiri merupakan Teknik yang dikembangkan dengan menitikberatkan studi mengenai dokumen-dokumen yang dikeluarkan yang dipublikasikan dan data yang menunjukkan pengalaman, tindakan, dan kepercayaan dari seseorang. Teknik ini dipilih karena Penulis hanya perlu mencari dokumen yang relevan dan subyektifitas yang sedikit, mencari intisarinnya, dan menghubungkannya dengan kerangka pemikiran yang ada.

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan menggunakan Teori Keamanan Kritis untuk menghasilkan pembahasan yang lebih komprehensif dan mendalam. Bab I Pendahuluan merupakan pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Kajian Literatur, Kerangka Pemikiran, Sistematik Pembahasan, dan

---

<sup>31</sup> Robert Elliott and Ladislav Timulak, "Chapter 11 Descriptive and interpretive approaches to qualitative research," in *A HANDBOOK OF RESEARCH METHODS FOR CLINICAL AND HEALTH PSYCHOLOGY* (Oxford, 2005), Hal. 148

Lini waktu Penulisan. Fokus dari Bab I adalah memberikan gambaran bagi pembaca mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di Sri Lanka, sebelum dan saat konflik sedang berkecamuk.

Bab II Konflik antara Pemerintah Sri Lanka akan berfokus pada data yang dibutuhkan oleh konsep dan teori. Dalam bab ini akan memuat data-data mengenai perbedaan klaim antara kedua pihak, peningkatan intensitas kekerasan antara Pemerintah Sri Lanka dengan Macan Tamil, eskalasi konflik, titik jenuh konflik, keterlibatan pihak ketiga dalam konflik Sri Lanka, kemampuan Pemerintah Sri Lanka dalam menghadapi konflik, titik jenuh konflik, dan keterlibatan pihak ketiga dalam konflik.

Bab III Kapasitas dan Kesempatan yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam Upaya Pembuatan Draft Klausul Perdamaian Konflik di Sri Lanka akan berfokus pada pengaplikasian teori, dalam konteks penelitian ini, Konsep Konflik untuk menjelaskan konflik di Sri Lanka ini secara konseptual melalui perspektif Konflik yang dikemukakan oleh Galtung, Konsep *Peacebuilding* digunakan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia bertujuan untuk memulihkan kondisi paska-konflik, Konsep Kapasitas dan Kesempatan dalam *Peacebuilding* digunakan untuk menjelaskan kapasitas dan momen yang digunakan selama *Peacebuilding*, Konsep Mediasi Perdamaian untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia di Sri Lanka agar terciptanya perdamaian, dan Teori *Soft Power* dari Joseph Nye jr. untuk menjelaskan bagaimana utilisasi dari kapasitas dan

kesempatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam Pembuatan Draft Klausul Perdamaian Konflik di Sri Lanka sebagai manifestasi dari *soft power*nya, yang akan digunakan terhadap data yang sudah dipaparkan sebelumnya pada Bab II.

Bab IV Kesimpulan akan menjadi penutup dari penelitian ini dengan jawaban, yang sudah diproses sebelumnya melalui pengaplikasian teori dan konsep terhadap data di Bab sebelumnya, untuk Pertanyaan Penelitian yang telah dipaparkan. Selain itu, pada bab ini akan dibuat sesuai dengan pointer yang ada di setiap konsep dan teori.